



KEMENTERIAN HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH BENGKULU**

Jalan Pangeran Natadirja Km. 7 Bengkulu 38225  
Telepon: (0736) 24743-22234, Faksimile (0736) 26304

Laman: <https://bengkulu.kemenkumham.go.id>, Surel: [kanwilbengkulu@kemenkumham.go.id](mailto:kanwilbengkulu@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.8-PR.04.05-07

12 Januari 2026

Sifat : segera

Lampiran : satu berkas

Hal : Penyampaian Matriks Manajemen Risiko  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu  
Tahun 2026

Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi

di tempat

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Nomor SEK.1-PR.04.05-04 tanggal 02 Januari 2026 perihal Penyusunan Manajemen Risiko Tahun 2026, bersama ini kami sampaikan Matriks Manajemen Risiko Tahun 2026 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu (terlampir).

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Kepala Kantor Wilayah



Zulhairi

## Langkah 1: Penetapan Tujuan

Unit Pemilik Risiko: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu

Periode Penerapan: 2026

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kode	Potensi Risiko
1	2	3	4	5	6
<b>Konteks MR: Standar Kinerja</b>					
1	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	1	Apabila terdapat temuan seringkali debitur tidak sanggup membayar temuan
				2	Terdapat beberapa aplikasi yang belum siap untuk dioperasikan dan masih sering error
				3	Kurangnya fasilitas bagi kelompok rentan untuk mewujudkan pelayanan publik prima
				4	Banyaknya sarana prasarana kehumasan yang tidak layak pakai dalam menunjang tugas dan fungsi
				5	Kurangnya kontributor berita pada setiap divisi
				6	Infrastruktur TI belum memadai seperti pengelolaan ruang server dan perangkat PC yang belum menunjang
				7	Kurangnya keaktifan Tim Kerja RB dan ZI dalam pemenuhan data dukung renaksi
				8	Kurangnya SDM yang membidangi tugas dan fungsi
2	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	9	Masyarakat belum memahami layanan AHU
				10	Masyarakat belum memahami aplikasi yang digunakan pada layanan AHU Online
				11	Laporan Masyarakat yang tidak sesuai prosedur pelaporan
3	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	13	belum terdapatnya tolak ukur dari tingkat pemahaman masyarakat terhadap diseminasi/edukasi KI di wilayah
				14	belum terdapatnya mediator KI dan belum optimalnya penyidikan yang dilakukan PPNS KI
4	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	15	Sumber Daya Manusia Perancang Peraturan PerUU masih kurang;

	Wilayah			16	Belum ada kewajiban secara PerUU bagi Pemerintah Daerah untuk mengikutsertakan Perancang Peraturan PerUU Kantor Wilayah.
				17	Masih minimnya pemahaman mengenai pentingnya proses harmonisasi di tingkat Pemerintah Daerah.
5	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	18	Bagian Hukum, DPRD, dan OPD terkait sering tidak memiliki mekanisme komunikasi yang efektif
				19	Aparatur daerah belum sepenuhnya memahami metode analisis dan evaluasi Perda, sehingga rekomendasi yang dihasilkan tidak ditindaklanjuti dengan baik
	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	20	Masih belum adanya PBH terakreditasi di beberapa Kabupaten untuk pemerataan akses keadilan di Provinsi Bengkulu, yaitu Kabupaten Seluma dan Kabupaten Lebong	
			21	Aplikasi Sidbakum yang pernah mengalami kerusakan sehingga data yang ada hilang, dan sering terjadi perbaikan pada aplikasi	
6	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	22	SDM untuk mengelola perpustakaan belum ada dan tenaga pustakawan
				23	Kendala sistem dari aplikasi yang sering terjadi perbaikan/tidak dapat diakses
			24	Belum adanya pelaksanaan bimbingan teknis terhadap digitalisasi dokumen dan informasi hukum	
	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	25	Seluruh desa/kelurahan sudah terbentuk pos bantuan hukum (posbankum), namun perlu adanya pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan posbankum di daerah yang rutin dilaksanakan.	
7	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	26	Jumlah Pejabat Fungsional Analis Kebijakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu masih terbatas ( baru memiliki 2 orang Fungsional Analis Kebijakan)
				27	Belum ada kewajiban stakeholder terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi kebijakan hukum di Wilayah
<b>Konteks MR: Risiko Fraud</b>					
8	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	28	Di beberapa Kabupaten hanya terdapat 1 (satu) PBH dengan jangkauan mencakup 1 (satu) Kabupaten sehingga memungkinkan kesalahan administrasi seperti kesalahan prosedur yang berujung pada sanksi administratif
9	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	29	Belum diberikan pelatihan penyelesaian sengketa pada seluruh Paralegal sehingga terdapat risiko penyaluran bantuan hukum yang tidak tepat misalnya menggunakan OBH yang tidak terakreditasi dan Paralegal yang tidak kompeten
<b>Konteks MR: Risiko Keuangan</b>					

10	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	30	Minimnya anggaran sehingga memungkinkan risiko masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai layanan AHU
		Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	31	Minimnya anggaran yang menyebabkan pelaksanaan pemeriksaan Notaris terbatas
11	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	32	Masyarakat masih menganggap biaya pendaftaran KI sebagai beban, bukan sebagai investasi
12	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	33	Minimnya anggaran sehingga memungkinkan risiko kurangnya pelaksanaan Harmonisasi ke Daerah
13	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	34	Minimnya anggaran sehingga memungkinkan risiko masih kurangnya pelaksanaan tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan perda
14	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	35	Tidak ada anggaran untuk pelatihan pengelolaan JDIH sehingga masih kurangnya pengelola JDIH yang belum mengikuti pelatihan/bimtek
		Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	36	Tidak ada anggaran pembinaan paralegal sehingga kurangnya pelaksanaan pembinaan Paralegal dan pengawasan Posbankum di wilayah sehingga minimnya Paralegal yang telah dilakukan pembinaan
				37	Kurangnya anggaran terkait kegiatan pembinaan posbankum di daerah sehingga kegiatan pembinaan posbankum dilaksanakan secara mandiri



Bengkulu, 12 Januari 2026  
Kepala Kantor Wilayah



Zulhairi

## Langkah 2: Identifikasi Risiko

Unit Pemilik Risiko: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu

Periode Penerapan: 2026

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kode	Potensi Risiko	Kategori Risiko	Pemilik Risiko	Kode	Potensi Penyebab Risiko	Sumber (Internal/Eksternal)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Konteks MR: Standar Kinerja</b>									
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK  Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK  Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	1	Apabila terdapat temuan seringkali debitur tidak sanggup membayar temuan	Risiko Operasional	Kepala Bagian TU dan Umum	1.1	Kurangnya kesadaran dan rasa tanggung jawab debitur	Eksternal
			2	Terdapat beberapa aplikasi yang belum siap untuk dioperasikan dan masih sering error	Risiko Operasional	Kepala Bagian TU dan Umum	2.1	Tidak matangnya uji coba aplikasi sebelum diluncurkan	Internal
			3	Kurangnya fasilitas bagi kelompok rentan untuk mewujudkan pelayanan publik prima	Risiko Operasional	Kepala Bagian TU dan Umum	3.1	Kurangnya tersedia anggaran untuk memenuhi fasilitas	Internal
			4	Banyaknya sarana prasarana kehumasan yang tidak layak pakai dalam menunjang tugas dan fungsi	Risiko Operasional	Kepala Bagian TU dan Umum	4.1	Banyak sarana dan prasarana yang rusak	Internal
			5	Kurangnya kontributor berita pada setiap divisi	Risiko Operasional	Kepala Bagian TU dan Umum	5.1	Narasi berita kegiatan yang akan di publish kurang lengkap atau tidak tepat	Internal
			6	Infrastruktur TI belum memadai seperti pengelolaan ruang server dan perangkat PC yang belum menunjang	Risiko Operasional	Kepala Bagian TU dan Umum	6.1	Pengadaan sarana TI terbatas	Internal
			7	Kurangnya keaktifan Tim Kerja RB dan ZI dalam pemenuhan data dukung renaksi	Risiko Operasional	Kepala Bagian TU dan Umum	7.1	Lambatnya respon pegawai saat permintaan data dukung	Internal
			8	Kurangnya SDM yang membidangi tugas dan fungsi	Risiko Operasional	Kepala Bagian TU dan Umum	8.1	SDM yang ada mengerjakan tugas dan fungsi yang berbeda dengan jabatan yang di emban	Internal
2	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	9	Masyarakat belum memahami layanan AHU	Risiko Operasional	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	9.1	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Eksternal
			10	Masyarakat belum memahami aplikasi yang digunakan pada layanan AHU Online	Risiko Operasional	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	10.1	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap layanan Administrasi Hukum Umum secara online	Eksternal
	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	11	Laporan Masyarakat yang tidak sesuai prosedur pelaporan	Risiko Operasional	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	11.1	Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pelaporan Notaris	Eksternal
			12	Peraturan Pemeriksaan pada MKNW baik di UUJN dan Pemenkumham belum secara komprehensif mengatur wewenang MKNW	Risiko Operasional	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	12.1	UUJN dan Permenkumham belum mengatur wewenang MKNW secara jelas	Internal

3	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	13	belum terdapatnya tolak ukur dari tingkat pemahaman masyarakat terhadap diseminasi/edukasi KI di wilayah	Risiko Operasional	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	13.1	Belum adanya petunjuk teknis terkait pre test dan post test sebelum dan sesudah dilaksanakannya diseminasi/edukasi KI	Internal
	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	14	belum terdapatnya mediator KI dan belum optimalnya penyidik yang dilakukan PPNS KI	Risiko Operasional	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	14.1	SDM yang bertindak sebagai mediator KI di wilayah belum ada	Internal
4	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	15	Sumber Daya Manusia Perancang Peraturan PerUU masih kurang;	Risiko Operasional	Kepala Divisi PPPH	15.1	Tidak sesuai jumlah perancang yang melaksanakan fasilitasi dengan jumlah permohonan yang masuk	Internal
			16	Belum ada kewajiban secara PerUU bagi Pemerintah Daerah untuk mengikutsertakan Perancang Peraturan PerUU Kantor Wilayah.	Risiko Operasional	Kepala Divisi PPPH	16.1	Belum ada peraturan pendundangan yang menetapkan perancang kantor wilayah wajib diikutsertakan dalam harmonisasi	Internal
			17	Masih minimnya pemahaman mengenai pentingnya proses harmonisasi di tingkat Pemerintah Daerah.	Risiko Operasional	Kepala Divisi PPPH	17.1	Masih kurangnya proses harmonisasi di tingkat Daerah	Eksternal
5	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	18	Bagian Hukum, DPRD, dan OPD terkait sering tidak memiliki mekanisme komunikasi yang efektif	Risiko Operasional	Kepala Divisi PPPH	18.1	Kurangnya pemahaman OPD mengenai tata komunikasi efektif	Eksternal
			19	Aparatur daerah belum sepenuhnya memahami metode analisis dan evaluasi Perda, sehingga rekomendasi yang dihasilkan tidak ditindaklanjuti dengan baik	Risiko Operasional	Kepala Divisi PPPH	19.1	Kurangnya pemahaman OPD tentang metode analisis dan evaluasi Perda	Eksternal
	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	20	Masih belum adanya PBH terakreditasi di beberapa Kabupaten untuk pemerataan akses keadilan di Provinsi Bengkulu, yaitu Kabupaten Seluma dan Kabupaten Lebong	Risiko Operasional	Kepala Divisi PPPH	20.1	Diperlukan PBH terakreditasi pada setiap Kabupaten	Eksternal
			21	Aplikasi Sidbakum yang pernah mengalami kerusakan sehingga data yang ada hilang, dan sering terjadi perbaikan pada aplikasi	Risiko Operasional	Kepala Divisi PPPH	21.1	Pemeliharaan aplikasi Sidbankum kurang baik	Eksternal
6	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	22	Kurangnya tata kelola perpustakaan	Risiko Operasional	Kepala Divisi PPPH	22.1	SDM untuk mengelola perpustakaan belum ada dan tenaga pustakawan	Internal
			23	Kendala sistem dari aplikasi yang sering terjadi perbaikan/tidak dapat diakses	Risiko Operasional	Kepala Divisi PPPH	23.1	Pemeliharaan aplikasi kurang baik	Eksternal
			24	Kurangnya pemahaman terhadap digitalisasi dokumen dan informasi hukum	Risiko Operasional	Kepala Divisi PPPH	24.1	Belum adanya pelaksanaan bimbingan teknis terhadap digitalisasi dokumen dan informasi hukum	Internal
	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	25	Seluruh desa/kelurahan sudah terbentuk pos bantuan hukum (posbankum), namun perlu adanya pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan posbankum di daerah yang rutin dilaksanakan.	Risiko Operasional	Kepala Divisi PPPH	25.1	Kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan posbankum di daerah yang rutin dilaksanakan	Internal

7	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	26	Kurangnya Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan pada Kantor Wilayah yang mengemban tugas dan fungsi kebijakan di wilayah	Risiko Operasional	Kepala Divisi PPPH	26.1	Jumlah Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu masih terbatas ( baru memiliki 2 orang Fungsional Analisis Kebijakan)	Internal
			27	Kurangnya timbal balik terhadap stakeholder di wilayah terkait kebijakan hukum	Risiko Operasional	Kepala Divisi PPPH	27.1	Belum ada kewajiban stakeholder terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi kebijakan hukum di Wilayah	Eksternal
<b>Konteks MR: Risiko Fraud</b>									
8	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	28	Di beberapa Kabupaten hanya terdapat 1 (satu) PBH dengan jangkauan mencakup 1 (satu) Kabupaten sehingga memungkinkan kesalahan administrasi seperti kesalahan prosedur yang berujung pada sanksi administratif	Risiko Fraud	Kepala Divisi PPPH	28.1	Minimnya jumlah PBH di Kabupaten tertentu yang terakreditasi	Eksternal
9	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	29	Belum diberikan pelatihan penyelesaian sengketa pada seluruh Paralegal sehingga terdapat risiko penyaluran bantuan hukum yang tidak tepat misalnya menggunakan PBH yang tidak terakreditasi dan Paralegal yang tidak kompeten	Risiko Fraud	Kepala Divisi PPPH	29.1	Minimnya pelatihan khusus kepada Paralegal yang merata	Internal
<b>Konteks MR: Risiko Keuangan</b>									
10	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	30	Minimnya anggaran sehingga memungkinkan risiko masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai layanan AHU	Risiko Keuangan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	30.1	Pemblokiran anggaran kegiatan sosialisasi	Internal
	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	31	Minimnya anggaran yang menyebabkan pelaksanaan pemeriksaan Notaris terbatas	Risiko Keuangan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	31.1	Anggaran Sidang Pemeriksaan Notaris dan Pleno di Blokir	Internal
11	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	32	Masyarakat masih menganggap biaya pendaftaran KI sebagai beban, bukan sebagai investasi	Risiko Keuangan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	32.1	Besaran pendaftaran Kekayaan Intelektual	Eksternal
12	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	33	Minimnya anggaran sehingga memungkinkan risiko kurangnya pelaksanaan Harmonisasi ke Daerah	Risiko Keuangan	Kepala Divisi PPPH	33.1	Belum adanya anggaran Harmonisasi ke Daerah	Internal

13	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	34	Minimnya anggaran sehingga memungkinkan risiko masih kurangnya pelaksanaan tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan perda	Risiko Keuangan	Kepala Divisi PPPH	34.1	Anggaran Pemerintah Daerah saat ini masih sangat minim menjadi kendala utama dalam tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan perda	Eksternal
14	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	35	Tidak ada anggaran untuk pelatihan pengelolaan JDIH sehingga masih kurangnya pengelola JDIH yang belum mengikuti pelatihan/bimtek	Risiko Keuangan	Kepala Divisi PPPH	35.1	Belum ada anggaran pelatihan/bimtek kepada pengelola JDIH di wilayah	Internal
	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	36	Tidak ada anggaran pembinaan paralegal sehingga kurangnya pelaksanaan pembinaan Paralegal dan pengawasan Posbankum di wilayah	Risiko Keuangan	Kepala Divisi PPPH	36.1	Belum adanya anggaran pelaksanaan pembinaan Paralegal dan pengawasan Posbankum di wilayah	Internal
			37	Kurangnya anggaran terkait kegiatan pembinaan posbankum di daerah sehingga kegiatan pembinaan posbankum dilaksanakan secara mandiri	Risiko Keuangan	Kepala Divisi PPPH	37.1	Anggaran pelaksanaan pembinaan posbankum di daerah yang belum tersedia	Internal



Bengkulu, 12 Januari 2026  
Kepala Kantor Wilayah



Zulhairi

### Langkah 3: Analisis Risiko

Unit Pemilik Risiko:

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu

Periode Penerapan:

2026

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Key Risk Indikator (KRI) / Indikator Risiko Utama	Toleransi Risiko	Kemungkinan terjadinya risiko		Dampak risiko		Tingkat Risiko	Profil Risiko
				Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Konteks MR: Standar Kinerja</b>									
1.1	Kurangnya kesadaran dan rasa tanggung jawab debitur	Terselesaikannya hasil temuan	1	Sering Terjadi	4	Moderat	3	16	Tinggi
2.1	Tidak matangnya uji coba aplikasi sebelum diluncurkan	Lancarnya penggunaan aplikasi	1	Kadang Terjadi	3	Moderat	3	14	Sedang
3.1	Tidak tersedia anggaran untuk memenuhi fasilitas	Tersedianya fasilitas kelompok rentan	1	Kadang Terjadi	3	Moderat	3	14	Sedang
4.1	Banyak sarana dan prasarana yang rusak	Jumlah sarana prasarana yang dapat digunakan	3	Kadang Terjadi	3	Minor	2	10	Rendah
5.1	Narasi berita kegiatan yang akan di publish kurang lengkap atau tidak tepat	Kesesuaian antara narasi berita dan tema kegiatan	1	Jarang Terjadi	2	Minor	2	7	Rendah
6.1	Pengadaan sarana TI terbatas	Tersedianya sarana TI yang memadai	2	Jarang Terjadi	2	Minor	2	7	Rendah
7.1	Lambatnya respon pegawai saat permintaan data dukung	Ketepatan waktu penyampaian data dukung	2	Kadang Terjadi	3	Moderat	3	14	Sedang
8.1	SDM yang ada mengerjakan tugas dan fungsi yang berbeda dengan jabatan yang di emban	Kesesuaian SDM yang mengerjakan dengan jabatan yang di emban	3	Kadang Terjadi	3	Minor	2	10	Rendah
9.1	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Pemahaman masyarakat terhadap masyarakat terhadap diseminasi/edukasi AHU	2	Jarang Terjadi	2	Moderat	3	11	Sedang
10.1	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap layanan Administrasi Hukum Umum secara online	Pemahaman masyarakat terhadap masyarakat terhadap diseminasi/edukasi AHU	2	Jarang Terjadi	2	Moderat	3	11	Sedang
11.1	Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pelaporan Notaris	Pemahaman masyarakat mengenai prosedur pelaporan Notaris	2	Jarang Terjadi	2	Moderat	3	11	Sedang
12.1	UUJN dan Permenkumham belum mengatur wewenang MKNW secara jelas	Terdapat UUJN dan Permenkumham yang mengatur wewenang MKNW secara jelas	2	Jarang Terjadi	2	Moderat	3	11	Sedang

13.1	Belum adanya petunjuk teknis terkait pre test dan post test sebelum dan sesudah dilaksanakannya diseminasi/edukasi KI	Adanya petunjuk teknis terkait pre test dan post test sebelum dan sesudah dilaksanakannya diseminasi/edukasi KI	2	Jarang Terjadi	2	Moderat	3	11	Sedang
14.1	SDM yang bertindak sebagai mediator KI di wilayah belum ada	Terdapat mediator KI di Wilayah	2	Kadang Terjadi	3	Moderat	3	14	Sedang
15.1	Tidak sesuai jumlah perancang yang melaksanakan fasilitasi dengan jumlah permohonan yang masuk	Sesuai jumlah perancang yang melaksanakan fasilitasi dengan jumlah permohonan yang masuk	2	Kadang Terjadi	3	Minor	2	10	Rendah
16.1	Belum ada peraturan pendundang-undangan yang menetapkan perancang kantor wilayah wajib diikutsertakan dalam harmonisasi	Terdapat peraturan pendundang-undangan yang menetapkan perancang kantor wilayah wajib diikutsertakan dalam harmonisasi	2	Kadang Terjadi	3	Moderat	3	14	Sedang
17.1	Masih kurangnya proses harmonisasi di tingkat Daerah	Sesuai proses harmonisasi di Wilayah	2	Jarang Terjadi	2	Moderat	3	11	Sedang
18.1	Kurangnya pemahaman OPD mengenai tata komunikasi efektif	Komunikasi yang efektif dengan OPD	1	Hampir Tidak Terjadi	1	Moderat	3	5	Sangat Rendah
19.1	Kurangnya pemahaman OPD tentang metode analisis dan evaluasi Perda	OPD paham tentang metode analisis dan evaluasi Perda	1	Jarang Terjadi	2	Moderat	3	11	Sedang
20.1	Diperlukan PBH terakreditasi pada setiap Kabupaten	Tersedianya PBH terakreditasi di setiap Kabupaten	1	Kadang Terjadi	3	Moderat	3	14	Sedang
21.1	Pemeliharaan aplikasi Sidbankum kurang baik	Lancarnya aplikasi Sidbankum	1	Jarang Terjadi	2	Signifikan	4	13	Sedang
22.1	SDM untuk mengelola perpustakaan belum ada dan tenaga pustakawan	Terdapatnya pustakawan dengan tata kelola yang baik	3	Jarang Terjadi	2	Minor	2	7	Rendah
23.1	Pemeliharaan aplikasi kurang baik	Lancarnya penggunaan aplikasi	1	Jarang Terjadi	2	Moderat	3	11	Sedang
24.1	Belum adanya pelaksanaan bimbingan teknis terhadap digitalisasi dokumen dan informasi hukum	Tersedianya bimbingan teknis terhadap digitalisasi dokumen dan informasi hukum	2	Jarang Terjadi	2	Minor	2	7	Rendah
25.1	Kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan posbankum di daerah yang rutin dilaksanakan	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan posbankum di Daerah	2	Jarang Terjadi	2	Moderat	3	11	Sedang
26.1	Jumlah Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu masih terbatas ( baru memiliki 2 orang Fungsional Analisis Kebijakan)	Tersedianya Fungsional yang memadai	2	Jarang Terjadi	2	Moderat	3	11	Sedang

27.1	Belum ada kewajiban stakeholder terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi kebijakan hukum di Wilayah	Terdapat tindak lanjut rekomendasi kebijakan hukum di wilayah	1	Jarang Terjadi	2	Moderat	3	11	Sedang
<b>Konteks MR : Risiko Fraud</b>									
28.1	Minimnya jumlah PBH di Kabupaten tertentu yang terakreditasi	Pada Kabupaten terdapat beberapa PBH	1	Jarang Terjadi	2	Moderat	3	11	Sedang
29.1	Minimnya pelatihan khusus kepada Paralegal yang merata	Tersedianya pelatihan untuk Paralegal	2	Jarang Terjadi	2	Minor	2	7	Rendah
<b>Konteks MR : Risiko Keuangan</b>									
30.1	Pemblokiran anggaran kegiatan sosialisasi	Terlaksananya Sosialisasi	1	Jarang Terjadi	2	Moderat	3	11	Sedang
31.1	Anggaran Sidang Pemeriksaan Notaris dan Pleno di Blokir	Terlaksananya seluruh Sidang Pemeriksaan Notaris dan Pleno	1	Jarang Terjadi	2	Moderat	3	11	Sedang
32.1	Besaran pendaftaran Kekayaan Intelektual	Masyarakat sadar pentingnya manfaat Kekayaan Intelektual	1	Kadang Terjadi	3	Moderat	3	14	Sedang
33.1	Belum adanya anggaran Harmonisasi ke Daerah	Terlaksananya harmonisasi ke Daerah	2	Kadang Terjadi	3	Moderat	3	14	Sedang
34.1	Anggaran Pemerintah Daerah saat ini masih sangat minim menjadi kendala utama dalam tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan perda	Terlaksananya analisis dan evaluasi pelaksanaan Perda	1	Kadang Terjadi	3	Moderat	3	14	Sedang
35.1	Belum ada anggaran pelatihan/bimtek kepada pengelola JDIIH di wilayah	Tersedianya pelatihan /bimtek pengelola JDIIH	2	Jarang Terjadi	2	Minor	2	7	Rendah
36.1	Belum adanya anggaran pelaksanaan pembinaan Paralegal dan pengawasan Posbankum di wilayah	Terlaksananya pembinaan Paralegal dan pengawasan Posbankum	2	Kadang Terjadi	3	Minor	2	10	Rendah
37.1	Anggaran pelaksanaan pembinaan posbankum di daerah yang belum tersedia	Terlaksananya pembinaan Posbankum di daerah	2	Kadang Terjadi	3	Moderat	3	14	Sedang



Bengkulu, 12 Januari 2026  
Kepala Kantor Wilayah



Zulhairi

### Langkah 4: Evaluasi Risiko

Unit Pemilik Risiko: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu

Periode Penerapan: 2026

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan profil risiko	Prioritas Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Konteks MR: Standar Kinerja</b>								
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan  Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK  Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	1.1	Apabila terdapat temuan seringkali debitur tidak sanggup membayar temuan	16	1	Terselesaikannya hasil temuan	1
			2.1	Terdapat beberapa aplikasi yang belum siap untuk dioperasikan dan masih sering eror	14	2	Lancarnya penggunaan aplikasi	1
			3.1	Kurangnya fasilitas bagi kelompok rentan untuk mewujudkan pelayanan publik prima	14	3	Tersedianya fasilitas kelompok rentan	1
			4.1	Banyaknya sarana prasarana kehumasan yang tidak layak pakai dalam menunjang tugas dan fungsi	10	27	Jumlah sarana prasarana yang dapat digunakan	3
			5.1	Kurangnya kontributor berita pada setiap divisi	7	31	Kesesuaian antara narasi berita dan tema kegiatan	1
			6.1	Infrastruktur TI belum memadai seperti pengelolaan ruang server dan perangkat PC yang belum menunjang	7	32	Tersedianya sarana TI yang memadai	2
			7.1	Kurangnya keaktifan Tim Kerja RB dan ZI dalam pemenuhan data dukung renaksi	14	4	Ketepatan waktu penyampaian data dukung	2
			8.1	Kurangnya SDM yang membidangi tugas dan fungsi	10	28	Kesesuaian SDM yang mengerjakan dengan jabatan yang di emban	3
2	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	9.1	Masyarakat belum memahami layanan AHU	11	13	Pemahaman masyarakat terhadap masyarakat terhadap diseminasi/edukasi AHU	2
			10.1	Masyarakat belum memahami aplikasi yang digunakan pada layanan AHU Online	11	14	Pemahaman masyarakat terhadap masyarakat terhadap diseminasi/edukasi AHU	2
	Terwujudnya Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	11.1	Laporan Masyarakat yang tidak sesuai prosedur pelaporan	11	15	Pemahaman masyarakat mengenai prosedur pelaporan Notaris	2
			12.1	Peraturan Pemeriksaan pada MKNW baik di UJUN dan Pemenkumham belum secara komprehensif mengatur wewenang MKNW	11	16	Terdapat UJUN dan Permenkumham yang mengatur wewenang MKNW secara jelas	2
3	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	13.1	belum terdapatnya tolak ukur dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap diseminasi/edukasi KI di wilayah	11	17	Adanya petunjuk teknis terkait pre test dan post test sebelum dan sesudah dilaksanakannya diseminasi/edukasi KI	2

	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	14.1	belum terdapatnya mediator KI dan belum optimalnya penyidikan yang dilakukan PPNs KI	14	5	Terdapat mediator KI di Wilayah	2
4	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	15.1	Sumber Daya Manusia Perancang Peraturan PerUU masih kurang;	10	29	Sesuai jumlah perancang yang melaksanakan fasilitasi dengan jumlah permohonan yang masuk	2
			16.1	Belum ada kewajiban secara PerUU bagi Pemerintah Daerah untuk mengikutsertakan Perancang Peraturan PerUU Kantor Wilayah.	14	6	Terdapat peraturan pendundang-undangan yang menetapkan perancang kantor wilayah wajib diikutsertakan dalam harmonisasi	2
			17.1	Masih minimnya pemahaman mengenai pentingnya proses harmonisasi di tingkat Pemerintah Daerah.	11	18	Sesuai proses harmonisasi di Wilayah	2
5	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	18.1	Bagian Hukum, DPRD, dan OPD terkait sering tidak memiliki mekanisme komunikasi yang efektif	5	37	Komunikasi yang efektif dengan OPD	1
			19.1	Aparatur daerah belum sepenuhnya memahami metode analisis dan evaluasi Perda, sehingga rekomendasi yang dihasilkan tidak ditindaklanjuti dengan baik	11	19	OPD paham tentang metode analisis dan evaluasi Perda	1
	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	20.1	Masih belum adanya PBH terakreditasi di beberapa Kabupaten untuk pemerataan akses keadilan di Provinsi Bengkulu, yaitu Kabupaten Seluma dan Kabupaten Lebong	14	7	Tersedianya PBH terakreditasi di setiap Kabupaten	1
			21.1	Aplikasi Sidbakum yang pernah mengalami kerusakan sehingga data yang ada hilang, dan sering terjadi perbaikan pada aplikasi	13	12	Lancarnya aplikasi Sidbankum	1
6	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	22.1	SDM untuk mengelola perpustakaan belum ada dan tenaga pustakawan	7	33	Terdapatnya pustakawan dengan tata kelola yang baik	3
			23.1	Kendala sistem dari aplikasi yang sering terjadi perbaikan/tidak dapat diakses	11	20	Lancarnya penggunaan aplikasi	1
			24.1	Belum adanya pelaksanaan bimbingan teknis terhadap digitalisasi dokumen dan informasi hukum	7	34	Tersedianya bimbingan teknis terhadap digitalisasi dokumen dan informasi hukum	2
	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	25.1	Seluruh desa/kelurahan sudah terbentuk pos bantuan hukum (posbankum), namun perlu adanya pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan posbankum di daerah yang rutin dilaksanakan.	11	21	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan posbankum di Daerah	2
7	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	26.1	Jumlah Pejabat Fungsional Analis Kebijakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu masih terbatas ( baru memiliki 2 orang Fungsional Analis Kebijakan)	11	22	Tersedianya Fungsional yang memadai	2
			27.1	Belum ada kewajiban stakeholder terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi kebijakan hukum di Wilayah	11	23	Terdapat tindak lanjut rekomendasi kebijakan hukum di wilayah	1
<b>Konteks MR: Risiko Fraud</b>								
8	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	28.1	Minimnya jumlah PBH di Kabupaten tertentu yang terakreditasi	11	24	Pada Kabupaten terdapat beberapa PBH	1
9	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	29.1	Minimnya pelatihan khusus kepada Paralegal yang merata	7	35	Tersedianya pelatihan untuk Paralegal	2
<b>Konteks MR: Risiko Keuangan</b>								

10	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	30.1	Pemblokiran anggaran kegiatan sosialisasi	11	25	Terlaksananya Sosialisasi	1
	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	31.1	Anggaran Sidang Pemeriksaan Notaris dan Pleno di Blokir	11	26	Terlaksananya seluruh Sidang Pemeriksaan Notaris dan Pleno	1
11	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	32.1	Besaran pendaftaran Kekayaan Intelektual	14	8	Masyarakat sadar pentingnya manfaat Kekayaan Intelektual	1
12	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	33.1	Belum adanya anggaran Harmonisasi ke Daerah	14	9	Terlaksananya harmonisasi ke Daerah	2
13	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	34.1	Anggaran Pemerintah Daerah saat ini masih sangat minim menjadi kendala utama dalam tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan perda	14	10	Terlaksananya analisis dan evaluasi pelaksanaan Perda	1
14	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	35.1	Belum ada anggaran pelatihan/bimtek kepada pengelola JDIH di wilayah	7	36	Tersedianya pelatihan /bimtek pengelola JDIH	2
	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	36.1	Belum adanya anggaran pelaksanaan pembinaan Paralegal dan pengawasan Posbankum di wilayah	10	30	Terlaksananya pembinaan Paralegal dan pengawasan Posbankum	2
			37.1	Anggaran pelaksanaan pembinaan posbankum di daerah yang belum tersedia	14	11	Terlaksananya pembinaan Posbankum di daerah	2



Bengkulu, 12 Januari 2026  
Kepala Kantor Wilayah



Zulhairi

Langkah 5: Rencana Aksi Penanganan Risiko

Unit Pemilik Risiko: Kantor Wilayah Bengkulu  
 Periode Penerapan: 2026

Keterangan  
 RM  
 Prv  
 Crr  
 Risk Mitigation  
 Preventive action  
 Corrective action

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil risiko	Prioritas Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko	Kode	Pengendalian Risiko (RM/Prv/Crr)	KCI/ Indikator Pengendalian Risiko	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Konteks MR: Standar Kinerja</b>										
1.1	Apabila terdapat temuan seringkali debitur tidak sanggup membayar temuan	16	1	Terselesaikannya hasil temuan	1	Prv 1.1	Melaksanakan pengawasan secara berkala agar tidak terdapat temuan tgen dan BPK	Terselesaikannya hasil temuan	1 Laporan (B.12)	Kepala Bagian TU dan Umum
						RM 1.1	Melakukan identifikasi awal dan observasi lapangan kepada calon penyedia (kesesuaian antara data/administrasi dan kondisi di lapangan) terhadap kesesuaian kondisi sebenarnya dari calon penyedia barang/jasa serta mengawasi secara ketat kegiatan yang berlangsung agar sesuai dengan ketetapan dan ketentuan			
						Crr 1.1	Apabila terdapat temuan, melaksanakan somasi kepada debitur agar segera menindaklanjuti hasil temuan			
2.1	Terdapat beberapa aplikasi yang belum siap untuk dioperasikan dan masih sering eror	14	2	Lancarnya penggunaan aplikasi	1	Prv 2.1	Melakukan pembacupan data secara manual	Lancarnya penggunaan aplikasi	4 Laporan (B.03, B.06, B.09, B.12)	Kepala Bagian TU dan Umum
						RM 2.1	Melakukan koordinasi kepada UKE I pengampu aplikasi			
3.1	Kurangnya fasilitas bagi kelompok rentan untuk mewujudkan pelayanan publik prima	14	3	Tersedianya fasilitas kelompok rentan	1	Prv 3.1	Menyusun anggaran untuk pengadaan fasilitas kelompok rentan	Tersedianya fasilitas kelompok rentan	4 Laporan (B.03, B.06, B.09, B.12)	Kepala Bagian TU dan Umum
						RM 3.1	Memaksimalkan fasilitas yang ada dan SDM untuk memprioritaskan pelayanan kelompok rentan			
4.1	Banyaknya sarana prasarana kehumasan yang tidak layak pakai dalam menunjang tugas dan fungsi	10	27	Jumlah sarana prasarana yang dapat digunakan	3	Prv 4.1	Mengajukan peminjaman sarana dan prasarana, alat transportasi	Jumlah sarana prasarana yang dapat digunakan	1 Laporan (B.12)	Kepala Bagian TU dan Umum
5.1	Kurangnya kontributor berita pada setiap divisi	7	31	Kesesuaian antara narasi berita dan tema kegiatan	1	Prv 5.1	Menetapkan kontributor berita untuk bertanggung jawab terhadap narasi berita setiap divisi agar penyampaian informasi kepada masyarakat tersampaikan dengan tepat	Kesesuaian antara narasi berita dan tema kegiatan	1 Laporan (B.03)	Kepala Bagian TU dan Umum
6.1	Infrastruktur TI belum memadai seperti pengelolaan ruang server dan perangkat PC yang belum menunjang	7	32	Tersedianya sarana TI yang memadai	2	Prv 6.1	Memaksimalkan fasilitas yang ada	Tersedianya sarana TI yang memadai	2 Laporan (B.06, B.12)	Kepala Bagian TU dan Umum
7.1	Kurangnya keaktifan Tim Kerja RB dan ZI dalam pemenuhan data dukung renaksi	14	4	Ketepatan waktu penyampaian data dukung	2	Prv 7.1	Melakukan pemberitahuan kepada tim agar menyiapkan data dukung	Ketepatan waktu penyampaian data dukung	4 Laporan (B.03, B.06, B.09, B.12)	Kepala Bagian TU dan Umum
						RM 7.1	Melakukan pemberitahuan kepada tim sebelum waktu penguploadan agar tidak terlambat dalam pemenuhan data dukung			

8.1	Kurangnya SDM yang membidangi tugas dan fungsi	10	28	Kesesuaian SDM yang mengerjakan dengan jabatan yang di emban	3	Prv 8.1	Melakukan pemetaan pegawai dan permintaan pegawai sesuai dengan formasi yang kosong	Kesesuaian SDM yang mengerjakan dengan jabatan yang di emban	2 Laporan (B.06, B.12)	Kepala Bagian TU dan Umum
9.1	Masyarakat belum memahami layanan AHU	11	13	Pemahaman masyarakat terhadap masyarakat terhadap diseminasi/edukasi AHU	2	Prv 9.1	Memaksimalkan materi diseminasi/edukasi terhadap pemahaman masyarakat	Pemahaman masyarakat terhadap masyarakat terhadap diseminasi/edukasi AHU	2 Laporan (B.06, B.12)	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
10.1	Masyarakat belum memahami aplikasi yang digunakan pada layanan AHU Online	11	14	Pemahaman masyarakat terhadap masyarakat terhadap diseminasi/edukasi AHU	2	Prv 10.1	Memaksimalkan materi diseminasi/edukasi terhadap pemahaman masyarakat	Pemahaman masyarakat terhadap masyarakat terhadap diseminasi/edukasi AHU	2 Laporan (B.06, B.12)	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
11.1	Laporan Masyarakat yang tidak sesuai prosedur pelaporan	11	15	Pemahaman masyarakat mengenai prosedur pelaporan Notaris	2	Prv 11.1	Memaksimalkan materi diseminasi/edukasi terhadap pemahaman mengenai prosedur	Pemahaman masyarakat mengenai prosedur pelaporan Notaris	2 Laporan (B.06, B.12)	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
12.1	Peraturan Pemeriksaan pada MKNW baik di UJUN dan Permenkumham belum secara komprehensif mengatur wewenang MKNW	11	16	Terdapat UJUN dan Permenkumham yang mengatur wewenang MKNW secara jelas	2	Prv 12.1	Melakukan koordinasi ke pusat	Terdapat UJUN dan Permenkumham yang mengatur wewenang MKNW secara jelas	2 Laporan (B.06, B.12)	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
13.1	belum terdapatnya tolak ukur dari tingkat pemahaman masyarakat terhadap diseminasi/edukasi KI di wilayah	11	17	Adanya petunjuk teknis terkait pre test dan post test sebelum dan sesudah dilaksanakannya diseminasi/edukasi KI	2	Prv 13.1	Melakukan monitoring berupa pre test dan post test saat sosialisasi dan diseminasi untuk melihat pemahaman masyarakat	Adanya petunjuk teknis terkait pre test dan post test sebelum dan sesudah dilaksanakannya diseminasi/edukasi KI	2 Laporan (B.06, B.12)	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
14.1	belum terdapatnya mediator KI dan belum optimalnya penyidikan yang dilakukan PPNS KI	14	5	Terdapat mediator KI di Wilayah	2	Prv 14.1	Melakukan permintaan SDM mediator KI	Terdapat mediator KI di Wilayah	2 Laporan (B.06, B.12)	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
						RM 14.1	Memaksimalkan SDM KI untuk menjadi mediator KI			
15.1	Sumber Daya Manusia Perancang Peraturan PerUU masih kurang;	10	29	Sesuai jumlah perancang yang melaksanakan fasilitasi dengan jumlah permohonan	2	Prv 15.1	Mengajukan permintaan SDM formasi Perancang	Sesuai jumlah perancang yang melaksanakan fasilitasi dengan jumlah permohonan yang masuk	2 Laporan (B.06, B.12)	Kepala Divisi PPPH
16.1	Belum ada kewajiban secara PerUU bagi Pemerintah Daerah untuk mengikutsertakan Perancang Peraturan PerUU Kantor Wilayah.	14	6	Terdapat peraturan pendundang-undangan yang menetapkan perancang kantor wilayah wajib diikutsertakan dalam harmonisasi	2	Prv 16.1	Melakukan koordinasi kepada instansi terkait	Terdapat peraturan pendundang-undangan yang menetapkan perancang kantor wilayah wajib diikutsertakan dalam harmonisasi	2 Laporan (B.06, B.12)	Kepala Divisi PPPH
						RM 16.1	Melakukan koordinasi kepada UKE I			
17.1	Masih minimnya pemahaman mengenai pentingnya proses harmonisasi di tingkat Pemerintah Daerah.	11	18	Sesuai proses harmonisasi di Wilayah	2	Prv 17.1	Melakukan koordinasi kepada instansi terkait	Sesuai proses harmonisasi di Wilayah	2 Laporan (B.06, B.12)	Kepala Divisi PPPH
18.1	Bagian Hukum, DPRD, dan OPD terkait sering tidak memiliki mekanisme komunikasi yang efektif	5	37	Komunikasi yang efektif dengan OPD	1	Prv 18.1	Melakukan koordinasi kepada instansi terkait	Komunikasi yang efektif dengan OPD	2 Laporan (B.06, B.12)	Kepala Divisi PPPH
19.1	Aparatur daerah belum sepenuhnya memahami metode analisis dan evaluasi Perda, sehingga rekomendasi yang dihasilkan tidak ditindaklanjuti dengan baik	11	19	OPD paham tentang metode analisis dan evaluasi Perda	1	Prv 19.1	Melakukan koordinasi kepada instansi terkait	OPD paham tentang metode analisis dan evaluasi Perda	2 Laporan (B.06, B.12)	Kepala Divisi PPPH
20.1	Masih belum adanya PBH terakreditasi di beberapa Kabupaten untuk pemerataan akses keadilan di Provinsi Bengkulu, yaitu Kabupaten	14	7	Tersedianya PBH terakreditasi di setiap Kabupaten	1	Prv 20.1	Mendorong PBH di Kabupaten agar segera melakukan dan memenuhi data dukung terkait akreditasi	Tersedianya PBH terakreditasi di setiap Kabupaten	2 Laporan (B.06, B.12)	Kepala Divisi PPPH

	Setuma dan Kabupaten Lebong					RM 20.1	Mendorong PBH di Kabupaten agar segera melakukan dan memenuhi data dukung terkait akreditasi			
21.1	Aplikasi Sidbankum yang pernah mengalami kerusakan sehingga data yang ada hilang, dan sering terjadi perbaikan pada aplikasi	13	12	Lancarnya aplikasi Sidbankum	1	Prv 1.1	Melakukan pbackupan data secara manual	Lancarnya aplikasi Sidbankum	2 Laporan (B.06, B.12)	Kepala Divisi PPPH
						RM 1.1	Melakukan koordinasi kepada UKE I pengampu aplikasi			
22.1	SDM untuk mengelola perpustakaan belum ada dan tenaga pustakawan	7	33	Terdapatnya pustakawan dengan tata kelola yang baik	3	Prv 1.1	Memaksimalkan fasilitas yang ada dan SDM untuk memprioritaskan pelayanan	Terdapatnya pustakawan dengan tata kelola yang baik	1 Laporan (B.03)	Kepala Divisi PPPH
23.1	Kendala sistem dari aplikasi yang sering terjadi perbaikan/tidak dapat diakses	11	20	Lancarnya penggunaan aplikasi	1	Prv 1.1	Melakukan pbackupan data secara manual	Lancarnya penggunaan aplikasi	2 Laporan (B.06, B.12)	Kepala Divisi PPPH
24.1	Belum adanya pelaksanaan bimbingan teknis terhadap digitalisasi dokumen dan informasi hukum	7	34	Tersedianya bimbingan teknis terhadap digitalisasi dokumen dan informasi hukum	2	Prv 1.1	Memaksimalkan SDM terkait digitalisasi dokumen dan informasi hukum	Tersedianya bimbingan teknis terhadap digitalisasi dokumen dan informasi hukum	2 Laporan (B.06, B.12)	Kepala Divisi PPPH
25.1	Seluruh desa/kelurahan sudah terbentuk pos bantuan hukum (posbankum), namun perlu adanya pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan posbankum di daerah yang rutin dilaksanakan.	11	21	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan posbankum di Daerah	2	Prv 1.1	Mengupayakan pengawasan menggunakan sarana yang ada dan secara virtual	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan posbankum di Daerah	2 Laporan (B.06, B.12)	Kepala Divisi PPPH
26.1	Jumlah Pejabat Fungsional Analis Kebijakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu masih terbatas ( baru memiliki 2 orang Fungsional Analis Kebijakan)	11	22	Tersedianya Fungsional yang memadai	2	Prv 1.1	Memaksimalkan SDM Analis Kebijakan yang ada di Wilayah	Tersedianya Fungsional yang memadai	2 Laporan (B.06, B.12)	Kepala Divisi PPPH
27.1	Belum ada kewajiban stakeholder terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi kebijakan hukum di Wilayah	11	23	Terdapat tindak lanjut rekomendasi kebijakan hukum di wilayah	1	Prv 1.1	Melakukan koordinasi kepada instansi terkait	Terdapat tindak lanjut rekomendasi kebijakan hukum di wilayah	2 Laporan (B.06, B.12)	Kepala Divisi PPPH
<b>Konteks MR: Risiko Fraud</b>										
28.1	Minimnya jumlah PBH di Kabupaten tertentu yang terakreditasi	11	24	Pada Kabupaten terdapat beberapa PBH	1	Prv 1.1	Mendorong Kabupaten untuk membentuk PBH dan mendorong PBH yang mumpuni	Pada Kabupaten terdapat beberapa PBH	2 Laporan (B.06, B.12)	Kepala Divisi PPPH
29.1	Minimnya pelatihan khusus kepada Paralegal yang merata	7	35	Tersedianya pelatihan untuk Paralegal	2	Prv 1.1	Mendorong paralegal untuk melakukan upgrade pengetahuan melalui media sosial dan virtual	Tersedianya pelatihan untuk Paralegal	2 Laporan (B.06, B.12)	Kepala Divisi PPPH
<b>Konteks MR: Risiko Keuangan</b>										
30.1	Pemblokiran anggaran kegiatan sosialisasi	11	25	Terlaksananya Sosialisasi	1	Prv 1.1	Memaksimalkan materi diseminasi/edukasi terhadap pemahaman masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi	2 Laporan (B.06, B.12)	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
31.1	Anggaran Sidang Pemeriksaan Notaris dan Pleno di Blokir	11	26	Terlaksananya seluruh Sidang Pemeriksaan Notaris dan Pleno	1	Prv 1.1	Melakukan pemeriksaan Notaris yang terindikasi melakukan penyimpangan	Terlaksananya seluruh Sidang Pemeriksaan Notaris dan Pleno	2 Laporan (B.06, B.12)	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
32.1	Besaran pendaftaran Kekayaan Intelektual	14	8	Masyarakat sadar pentingnya manfaat Kekayaan Intelektual	1	Prv 1.1	Memaksimalkan materi diseminasi/edukasi terhadap pemahaman masyarakat	Masyarakat sadar pentingnya manfaat Kekayaan Intelektual	2 Laporan (B.06, B.12)	Kepala Divisi Pelayanan Hukum

						RM 1.1	Melakukan pemahaman melalui media sosial			
33.1	Belum adanya anggaran Harmonisasi ke Daerah	14	9	Terlaksananya harmonisasi ke Daerah	2	Prv 1.1	Melakukan koordinasi kepada instansi terkait	Terlaksananya harmonisasi ke Daerah	2 Laporan (B.06, B.12)	Kepala Divisi PPPH
						RM 1.1	Melaksanakan harmonisasi di Kantor Wilayah			
34.1	Anggaran Pemerintah Daerah saat ini masih sangat minim menjadi kendala utama dalam tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan perda	14	10	Terlaksananya analisis dan evaluasi pelaksanaan Perda	1	Prv 1.1	Melakukan kegiatan analisis dengan memaksimalkan SDM	Terlaksananya analisis dan evaluasi pelaksanaan Perda	2 Laporan (B.06, B.12)	Kepala Divisi PPPH
						RM 1.1	Koordinasi kepada UKE I dan melakukan pengajuan anggaran			
35.1	Belum ada anggaran pelatihan/bimtek kepada pengelola JDIH di wilayah	7	36	Tersedianya pelatihan /bimtek pengelola JDIH	2	Prv 1.1	Melakukan pengawasan terhadap anggota JDIH dan memaksimalkan pelatihan secara virtual	Tersedianya pelatihan /bimtek pengelola JDIH	2 Laporan (B.06, B.12)	Kepala Divisi PPPH
36.1	Belum adanya anggaran pelaksanaan pembinaan Paralegal dan pengawasan Posbankum di wilayah	10	30	Terlaksananya pembinaan Paralegal dan pengawasan Posbankum	2	Prv 1.1	Melakukan pembinaan secara virtual	Terlaksananya pembinaan Paralegal dan pengawasan Posbankum	2 Laporan (B.06, B.12)	Kepala Divisi PPPH
37.1	Anggaran pelaksanaan pembinaan posbankum di daerah yang belum tersedia	14	11	Terlaksananya pembinaan Posbankum di daerah	2	Prv 1.1	Melakukan kordinasi dengan posbankum secara berkala	Terlaksananya pembinaan Posbankum di daerah	2 Laporan (B.06, B.12)	Kepala Divisi PPPH
						RM 1.1	Memfaatkan akses virtual untuk melakukan pembinaan			



Bengkulu, 12 Januari 2026  
Kepala Kantor Wilayah



Zulhairi

## Langkah 6: Pemantauan dan Reviu

Unit Pemilik Risiko: Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
Periode Penerapan: 2026

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko	Risiko yang terjadi (risk exposure )	Risiko terjadi - Toleransi Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan (eksekusi)	KCI/ Indikator Pengendalian Risiko	Penanggung Jawab	Target	Realisasi	Kinerja Pengendalian Risiko	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Konteks MR: Standar Kinerja</b>													
1.1	Apabila terdapat temuan seringkali debitur tidak sanggup membayar temuan	16	Terselenggaranya hasil temuan	1	0	-1	Melaksanakan pengawasan secara berkala agar tidak terdapat temuan ljen dan BPK	Terselesainya hasil temuan	Kepala Bagian TU dan Umum	1 Laporan (B.12)			belum melaksanakan kegiatan terkait
2.1	Terdapat beberapa aplikasi yang belum siap untuk dioperasikan dan masih sering error	14	Lancarnya penggunaan aplikasi	1	2	1	Melakukan koordinasi kepada UKE I pengampu aplikasi	Lancarnya penggunaan aplikasi	Kepala Bagian TU dan Umum	4 Laporan (B.03, B.06, B.09, B.12)			belum melaksanakan kegiatan terkait
3.1	Kurangnya fasilitas bagi kelompok rentan untuk mewujudkan pelayanan publik prima	14	Tersedianya fasilitas kelompok rentan	1	2	-1	Memaksimalkan fasilitas yang ada dan SDM untuk memprioritaskan pelayanan kelompok rentan	Tersedianya fasilitas kelompok rentan	Kepala Bagian TU dan Umum	4 Laporan (B.03, B.06, B.09, B.12)			belum melaksanakan kegiatan terkait
4.1	Banyaknya sarana prasarana kehumasan yang tidak layak pakai dalam menunjang tugas dan fungsi	10	Jumlah sarana prasarana yang dapat digunakan	3	2	-1	Mengajukan peminjaman sarana dan prasarana, alat transportasi	Jumlah sarana prasarana yang dapat digunakan	Kepala Bagian TU dan Umum	1 Laporan (B.12)			belum melaksanakan kegiatan terkait
5.1	Kurangnya kontributor berita pada setiap divisi	7	Kesesuaian antara narasi berita dan tema kegiatan	1		-1	Menetapkan kontributor berita untuk bertanggung jawab terhadap narasi berita setiap divisi agar penyampaian informasi kepada masyarakat tersampaikan dengan tepat	Kesesuaian antara narasi berita dan tema kegiatan	Kepala Bagian TU dan Umum	1 Laporan (B.03)			belum melaksanakan kegiatan terkait
6.1	Infrastruktur TI belum memadai seperti pengelolaan ruang server dan perangkat PC yang belum menunjang	7	Tersedianya sarana TI yang memadai	2	2	0	Memaksimalkan fasilitas yang ada	Tersedianya sarana TI yang memadai	Kepala Bagian TU dan Umum	2 Laporan (B.06, B.12)			belum melaksanakan kegiatan terkait
7.1	Kurangnya keaktifan Tim Kerja RB dan ZI dalam pemenuhan data dukung renaksi	14	Ketepatan waktu penyampaian data dukung	2	1	-1	Melakukan pemberitahuan kepada tim sebelum waktu penyediaan data dukung terlambat dalam pemenuhan data dukung	Ketepatan waktu penyampaian data dukung	Kepala Bagian TU dan Umum	4 Laporan (B.03, B.06, B.09, B.12)			belum melaksanakan kegiatan terkait
8.1	Kurangnya SDM yang mendelegasikan tugas dan fungsi	10	Kesesuaian SDM yang mengerjakan dengan jabatan yang di emban	3	1	-2	Melakukan pemetaan pegawai dan permintaan pegawai sesuai dengan formasi yang kosong	Kesesuaian SDM yang mengerjakan dengan jabatan yang di emban	Kepala Bagian TU dan Umum	2 Laporan (B.06, B.12)			belum melaksanakan kegiatan terkait
9.1	Masyarakat belum memahami layanan AHU	11	Pemahaman masyarakat terhadap masyarakat terhadap diseminasi/edukasi AHU	2	1	-1	Memaksimalkan materi diseminasi/edukasi terhadap pemahaman masyarakat	Pemahaman masyarakat terhadap masyarakat terhadap diseminasi/edukasi AHU	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	2 Laporan (B.06, B.12)			belum melaksanakan kegiatan terkait
10.1	Masyarakat belum memahami aplikasi yang digunakan pada layanan AHU Online	11	Pemahaman masyarakat terhadap masyarakat terhadap diseminasi/edukasi AHU	2	1	-1	Memaksimalkan materi diseminasi/edukasi terhadap pemahaman masyarakat	Pemahaman masyarakat terhadap masyarakat terhadap diseminasi/edukasi AHU	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	2 Laporan (B.06, B.12)			belum melaksanakan kegiatan terkait
11.1	Laporan Masyarakat yang tidak sesuai prosedur pelaporan	11	Pemahaman masyarakat mengenai prosedur pelaporan Notaris	2	1	-1	Memaksimalkan materi diseminasi/edukasi terhadap pemahaman mengenai prosedur pelaporan notaris	Pemahaman masyarakat mengenai prosedur pelaporan Notaris	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	2 Laporan (B.06, B.12)			belum melaksanakan kegiatan terkait
12.1	Peraturan Pemeriksaan pada MKNW baik di UJUN dan Permenkumham belum secara komprehensif mengatur wewenang MKNW	11	Terdapat UUJN dan Permenkumham yang mengatur wewenang MKNW secara jelas	2	1	-1	Melakukan koordinasi ke pusat	Terdapat UUJN dan Permenkumham yang mengatur wewenang MKNW secara jelas	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	2 Laporan (B.06, B.12)			belum melaksanakan kegiatan terkait
13.1	belum terdapatnya tolak ukur dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap diseminasi/edukasi KI di wilayah	11	Adanya petunjuk teknis terkait pre test dan post test sebelum dan sesudah dilaksanakan diseminasi/edukasi KI	2	1	-1	Melakukan monitoring berupa pre test dan post test saat sosialisasi dan diseminasi untuk melihat pemahaman masyarakat	Adanya petunjuk teknis terkait pre test dan post test sebelum dan sesudah dilaksanakannya diseminasi/edukasi KI	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	2 Laporan (B.06, B.12)			belum melaksanakan kegiatan terkait
14.1	belum terdapatnya mediator KI dan belum optimalnya penyidikan yang dilakukan PPNs KI	14	Terdapat mediator KI di Wilayah	2	1	-1	Melakukan permintaan SDM mediator KI	Terdapat mediator KI di Wilayah	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	2 Laporan (B.06, B.12)			belum melaksanakan kegiatan terkait
15.1	Sumber Daya Manusia Perancang Peraturan PerUU masih kurang;	10	Sesuai jumlah perancang yang melaksanakan fasilitas dengan jumlah permohonan yang masuk	2	1	-1	Mengajukan permintaan SDM formasi Perancang	Sesuai jumlah perancang yang melaksanakan fasilitas dengan jumlah permohonan yang masuk	Kepala Divisi PPPH	2 Laporan (B.06, B.12)			belum melaksanakan kegiatan terkait

16.1	Belum ada kewajiban secara PerUU bagi Pemerintah Daerah untuk mengikutsertakan Perancang Peraturan PerUU Kantor Wilayah.	14	Terdapat peraturan perundang-undangan yang menetapkan perancang kantor wilayah wajib dikusertakan dalam harmonisasi	2	1	-1	Melakukan koordinasi kepada instansi terkait	Terdapat peraturan perundang-undangan yang menetapkan perancang kantor wilayah wajib dikusertakan dalam harmonisasi	Kepala Divisi PPPH	2 Laporan (B.06, B.12)			belum melaksanakan kegiatan terkait
17.1	Masih minimnya pemahaman mengenai pentingnya proses harmonisasi di tingkat Pemerintah Daerah.	11	Sesuai proses harmonisasi di Wilayah	2	1	-1	Melakukan koordinasi kepada instansi terkait	Sesuai proses harmonisasi di Wilayah	Kepala Divisi PPPH	2 Laporan (B.06, B.12)			belum melaksanakan kegiatan terkait
18.1	Bagian Hukum, DPRD, dan OPD terkait sering tidak memiliki mekanisme komunikasi yang efektif	6	Komunikasi yang efektif dengan OPD	1	1	0	Melakukan koordinasi kepada instansi terkait	Komunikasi yang efektif dengan OPD	Kepala Divisi PPPH	2 Laporan (B.06, B.12)			belum melaksanakan kegiatan terkait
19.1	Aparatur daerah belum sepenuhnya memahami metode analisis dan evaluasi Perda, sehingga rekomendasi yang dihasilkan tidak diindaklanjuti dengan baik	11	OPD paham tentang metode analisis dan evaluasi Perda	1	1	0	Melakukan koordinasi kepada instansi terkait	OPD paham tentang metode analisis dan evaluasi Perda	Kepala Divisi PPPH	2 Laporan (B.06, B.12)			belum melaksanakan kegiatan terkait
20.1	Masih belum adanya PBH terakreditasi di beberapa Kabupaten untuk pemerataan akses kasalid di Provinsi Bengkulu, yaitu Kabupaten Seluma dan Kabupaten Lebong	14	Tersedianya PBH terakreditasi di setiap Kabupaten	1	2	1	Mendorong PBH di Kabupaten agar segera melakukan dan memenuhi data dukung terkait akreditasi	Tersedianya PBH terakreditasi di setiap Kabupaten	Kepala Divisi PPPH	2 Laporan (B.06, B.12)			belum melaksanakan kegiatan terkait
21.1	Aplikasi Sidbankum yang pernah mengalami kerusakan sehingga data yang ada hilang, dan sering terjadi perbaikan pada aplikasi	13	Lancarnya aplikasi Sidbankum	1	1	0	Melakukan koordinasi kepada UKE I pengampu aplikasi	Lancarnya aplikasi Sidbankum	Kepala Divisi PPPH	2 Laporan (B.06, B.12)			belum melaksanakan kegiatan terkait
22.1	SDM untuk mengelola perpustakaan belum ada dan tenaga pustakawan	7	Terdapatnya pustakawan dengan tata kelola yang baik	3	2	-1	Memaksimalkan fasilitas yang ada dan SDM untuk memprioritaskan pelayanan	Terdapatnya pustakawan dengan tata kelola yang baik	Kepala Divisi PPPH	1 Laporan (B.03)			belum melaksanakan kegiatan terkait
23.1	Kendala sistem dan aplikasi yang sering terjadi perbaikan/tidak dapat diakses	11	Lancarnya penggunaan aplikasi	1	1	0	Melakukan pembackupan data secara manual	Lancarnya penggunaan aplikasi	Kepala Divisi PPPH	2 Laporan (B.06, B.12)			belum melaksanakan kegiatan terkait
24.1	Belum adanya pelaksanaan bimbingan teknis terhadap digitalisasi dokumen dan informasi hukum	7	Tersedianya bimbingan teknis terhadap digitalisasi dokumen dan informasi hukum	2	1	-1	Memaksimalkan SDM terkait digitalisasi dokumen dan informasi hukum	Tersedianya bimbingan teknis terhadap digitalisasi dokumen dan informasi hukum	Kepala Divisi PPPH	2 Laporan (B.06, B.12)			belum melaksanakan kegiatan terkait
25.1	Seluruh desa/keurahan sudah terbentuk pos bantuan hukum (posbankum), namun perlu adanya pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan posbankum di daerah yang rutin dilaksanakan.	11	Tertaksananya pengawasan dan pembinaan posbankum di Daerah	2	1	-1	Mengupayakan pengawasan menggunakan sarana yang ada dan secara virtual	Tertaksananya pengawasan dan pembinaan posbankum di Daerah	Kepala Divisi PPPH	2 Laporan (B.06, B.12)			belum melaksanakan kegiatan terkait
26.1	Jumlah Pejabat Fungsional Analis Kebijakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu masih terbatas (baru memiliki 2 orang Fungsional Analis Kebijakan)	11	Tersedianya Fungsional yang memadai	2	1	-1	Memaksimalkan SDM Analis Kebijakan yang ada di Wilayah	Tersedianya Fungsional yang memadai	Kepala Divisi PPPH	2 Laporan (B.06, B.12)			belum melaksanakan kegiatan terkait
27.1	Belum ada kewajiban stakeholder terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi kebijakan hukum di Wilayah	11	Terdapat tindak lanjut rekomendasi kebijakan hukum di wilayah	1	1	0	Melakukan koordinasi kepada instansi terkait	Terdapat tindak lanjut rekomendasi kebijakan hukum di wilayah	Kepala Divisi PPPH	2 Laporan (B.06, B.12)			belum melaksanakan kegiatan terkait
<b>Konteks MR: Risiko Fraud</b>													
28.1	Minimnya jumlah PBH di Kabupaten tertentu yang terakreditasi	11	Pada Kabupaten terdapat beberapa PBH	1	1	0	Mendorong Kabupaten untuk membentuk PBH dan mendorong PBH yang mumpuni	Pada Kabupaten terdapat beberapa PBH	Kepala Divisi PPPH	2 Laporan (B.06, B.12)			belum melaksanakan kegiatan terkait

29.1	Minimnya pelatihan khusus kepada Paralegal yang merata	7	Tersedianya pelatihan untuk Paralegal	2	1	-1	Mendorong paralegal untuk melakukan upgrade pengetahuan melalui media sosial dan virtual	Tersedianya pelatihan untuk Paralegal	Kepala Divisi PPPH	2 Laporan (B.06, B.12)		belum melaksanakan kegiatan terkait
<b>Konteks MR: Risiko Keuangan</b>												
30.1	Pemblokiran anggaran kegiatan sosialisasi	11	Terlaksananya Sosialisasi	1	1	0	Memaksimalkan materi diseminasi/edukasi terhadap pemahaman masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	2 Laporan (B.06, B.12)		belum melaksanakan kegiatan terkait
31.1	Anggaran Sidang Pemeriksaan Notaris dan Pleno di Blokir	11	Terlaksananya seluruh Sidang Pemeriksaan Notaris dan Pleno	1	1	0	Melakukan pemeriksaan Notaris yang terindikasi melakukan penyimpangan	Terlaksananya seluruh Sidang Pemeriksaan Notaris dan Pleno	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	2 Laporan (B.06, B.12)		belum melaksanakan kegiatan terkait
32.1	Besaran pendaftaran Kekayaan Intelektual	14	Masyarakat sadar pentingnya manfaat Kekayaan Intelektual	1	1	0	Memaksimalkan materi diseminasi/edukasi terhadap pemahaman masyarakat dan sosialisasi melalui media sosial	Masyarakat sadar pentingnya manfaat Kekayaan Intelektual	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	2 Laporan (B.06, B.12)		belum melaksanakan kegiatan terkait
33.1	Belum adanya anggaran Harmonisasi ke Daerah	14	Terlaksananya harmonisasi ke Daerah	2	1	-1	Melaksanakan harmonisasi di Kantor Wilayah	Terlaksananya harmonisasi ke Daerah	Kepala Divisi PPPH	2 Laporan (B.06, B.12)		belum melaksanakan kegiatan terkait
34.1	Anggaran Pemerintah Daerah saat ini masih sangat minim menjadi kendala utama dalam tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan perda	14	Terlaksananya analisis dan evaluasi pelaksanaan Perda	1	1	0	Melakukan kegiatan analisis dengan memaksimalkan SDM	Terlaksananya analisis dan evaluasi pelaksanaan Perda	Kepala Divisi PPPH	2 Laporan (B.06, B.12)		belum melaksanakan kegiatan terkait
35.1	Belum ada anggaran pelatihan/bimtek kepada pengelola JDIH di wilayah	7	Tersedianya pelatihan /bimtek pengelola JDIH	2	1	-1	Melakukan pengawasan terhadap anggota JDIH dan memaksimalkan pelatihan secara virtual	Tersedianya pelatihan /bimtek pengelola JDIH	Kepala Divisi PPPH	2 Laporan (B.06, B.12)		belum melaksanakan kegiatan terkait
36.1	Belum adanya anggaran pelaksanaan pembinaan Paralegal dan pengawasan Posbankum di wilayah	10	Terlaksananya pembinaan Paralegal dan pengawasan Posbankum	2	1	-1	Melakukan pembinaan secara virtual	Terlaksananya pembinaan Paralegal dan pengawasan Posbankum	Kepala Divisi PPPH	2 Laporan (B.06, B.12)		belum melaksanakan kegiatan terkait
37.1	Anggaran pelaksanaan pembinaan posbankum di daerah yang belum tersedia	14	Terlaksananya pembinaan Posbankum di daerah	2	1	-1	Melakukan kordinasi dengan posbankum secara berkala	Terlaksananya pembinaan Posbankum di daerah	Kepala Divisi PPPH	2 Laporan (B.06, B.12)		belum melaksanakan kegiatan terkait





**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH BENGKULU**

**PIAGAM MANAJEMEN RISIKO  
NOMOR : W.8-PW.01.03-04  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU  
TAHUN 2026**

Dalam rangka pencapaian sasaran pada unit Kantor Wilayah Kementerian Hukum saya menyatakan:

1. Piagam Manajemen Risiko ini merupakan hasil penguangan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko yang meliputi Penetapan Tujuan, Identifikasi Risiko (Daftar Risiko), Analisis Risiko (Peta Risiko), Evaluasi Risiko (Indikator Risiko Utama-IRU) dan Penanganan Risiko (Rencana Aksi);
2. Pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan dengan melibatkan seluruh koordinator Risiko dan sesuai dengan ketentuan terkait penerapan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Hukum;
3. Rencana Penanganan Risiko yang dituangkan dalam piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin;
4. Untuk mengingatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko, akan dilakukan pemantauan dan reviu secara berkala dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.



Bengkulu, 3 Februari 2026

Ditetapkan oleh:  
Kepala kantor Wilayah



Zulhairi